

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN MARIDAN KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA¹

Melda Palimbunga²

Abstrak

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, sudah terlaksana meskipun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh peran pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di kelurahan Maridan. Dimana dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih yang waktu pengerjaannya sangat lambat dan setelah terealisasi airnya tidak jernih atau masih berwarna dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang memberikan bantuan modal usaha kepada kaum perempuan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan baik karena masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diantaranya adanya keterbatasan dari Pelaku PNPM –MP di Kelurahan Maridan yaitu TPU dan TPK dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh PNPM-MP di kelurahan Maridan. Meski demikian upaya tersebut telah membawa perubahan yang berarti yaitu sebagai masyarakat mandiri, dan juga ada masyarakat yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.*

¹ Materi dari artikel ini berasal dari artikel yang ditulis oleh Melda (mahasiswa Prodi IP Fisip Unmul) di ejournal Sosial-Politika Fisip Unmul.

² Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: melda_palimbunga@ymail.com.

Pendahuluan

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Pendum PNPM Mandiri, 2007).

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dibuat. *Pertama*, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya. Alasan *kedua* mengapa PNPM Mandiri Perdesaan dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini termasuk program pengentasan kemiskinan.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data yang dipakai bukan hanya data-data kualitatif, tapi juga data-data kuantitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan bahasan pada

pendiskualifikasian tersebut, gambaran umum tentang PNPM Mandiri Perdesaan akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidak berdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Sehubungan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk lebih memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, perlu mengubah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/ XI/2006 tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (Royat, 2007:1).

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.³ Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelebagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

³ Istilah PNPM Mandiri Perdesaan populer sekitar tahun 2007 pada saat presiden susilo Bambang Yudoyono memperkenalkan dan meresmikan di kota Palu Sulawesi. Dan kepanjangan dari PNPM adalah (**Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**).

- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, Sumber Daya Manusia, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosialbudaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Kebijakan-kebijakan Pemberdayaan Masyarakat merupakan gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang *developmentalisme* (modernisasi). Sedangkan tugas-tugas Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsure tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Konsep Implementasi

Widodo (2006:19) mendefinisikan *implementasi* sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Joner dalam Widodo (2006:22) mengartikan *implementasi* sebagai suatu proses yang dapat dilaksanakan dengan mudah.

Nugroho (2006:106) memberikan penjelasan bahwa *Implementasi Program* pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan program dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan program pembangunan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan program-program pembangunan dan *implementasi program* dalam bentuk keputusan dan peraturan.

Fungsi *implementasi* merupakan tindakan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program kerja. Dengan demikian fungsi *implementasi* terdiri dari tindakan atau cara-cara atau saran-saran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan yang dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Smith dan Grindle dalam Wahab (2000:37) melihat bahwa *implementasi* merupakan sandungan terberat dan serius bagi efektivitas kebijaksanaan pembangunan dibanding sosial ekonomi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Program yang akan diimplementasikan tidak lepas dari berbagai faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap program itu sendiri. Manurung (2003:38) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang implementasi program terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal di sini mencakup keseluruhan program yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Faktor internal terdiri dari :

- a) Misi dan tujuan program
- b) Strategi Pencapaian Tujuan
- c) Sifat dan Jenis Kegiatan
- d) Jenis Teknologi yang Digunakan

2. Faktor Eksternal

Organisasi itu berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Agar kegiatan program itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka harus memperhitungkan faktor eksternal yang terdiri dari :

- a) Kebijakan Pemerintah
- b) Sosial Budaya Masyarakat
- c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Fokus Penelitian

- a. Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
 - a) Sosialisasi
 - b) Pengajuan Pinjaman
 - c) Verifikasi dan Pembahasan
 - d) Penyaluran Dana
 - e) Musyawarah Pertanggungjawaban
- b. Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Air Bersih.

Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan pada fokus penelitian maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

PNPM Mandiri Pedesaan menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).⁴ Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang terdapat di Kelurahan Maridan sudah berjalan empat tahun yakni pada tahun anggaran 2008, 2009, 2010, 2011 serta untuk pada tahun anggaran 2012 kelompok perempuan dari kelurahan maridan masih mengusulkan pinjaman modal melalui PNPM Mandiri Pedesaan. Dana SPP tersebut berasal dari APBN dan APBD sama seperti program kegiatan PNPM Mandiri lainnya yang dikelola UPK yang merupakan dana perguliran.

Berikut ini yang menjadi alur tahapan dalam proses pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan di kelurahan maridan yakni:

Sosialisasi

Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam sosialisasi simpan pinjam khusus perempuan UPK, TPK dan KPMD/K melakukan pengenalan terhadap program simpan pinjam khusus perempuan melalui musyawarah antar desa (mudes) yang dihadiri oleh masyarakat kelurahan maridan dan juga TPK memberitahukan kepada masyarakat melalui masing-masing RT bahwa sedang dilaksanakannya program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Program SPP.

⁴ Spp merupakan program dari PNPM Mandiri Pedesaan yang memberikan modal kepada kaum perempuan/ ibu rumah tangga tujuannya agar tingkat kemiskinan di dalam komunitas ibu rumah tangga ataupun kaum perempuan dapat teratasi.

Tujuannya diadakannya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui apa itu program SPP dan bagaimana cara melakukan peminjaman. Tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh UPK,⁵ KPMDK⁶ dan TPK⁷ tidak efektif karena sosialisasi yang dilakukan dari mulut ke mulut yaitu UPK dan TPK menyampaikan ke RT bahwa sedang dilaksanakannya Program SPP,⁸ setelah itu RT lah yang menyampaikan ke warganya. Seharusnya sosialisasi tersebut pihak pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lah yang turun langsung menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tanpa adanya perwakilan dari RT sehingga jika masyarakat yang ingin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang program SPP dapat dijelaskan langsung dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Pengajuan Pinjaman

Adapun syarat untuk dapat melakukan pinjaman melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah, dengan mempunyai kelompok perempuan yang jumlah anggotanya minimal lima orang, setiap kelompok harus memiliki jenis usaha yang sudah berjalan selama setahun dan memiliki KTP yang berdomisili di Kelurahan Maridan. Selanjutnya setelah syarat terpenuhi barulah membuat sebuah formulir oleh kelompok beserta dengan anggotanya tentang berapa besar nominal yang akan dipinjam di PNPM Mandiri Perdesaan dengan melampirkan nama-nama anggota dan jenis usahanya, formulir tersebut kemudian diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Verifikasi dan Pembahasan

Setelah mengajukan formulir ke UPK dan di periksa tidak ada masalah maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi (TV) guna mengetahui kebenaran dari pada formulir dengan mengundang semua anggota dari setiap kelompok perempuan tersebut siapa-siapa saja anggotanya apakah sesuai dengan data yang ada pada formulir tersebut, setelah diperiksa maka formulir tersebut lulus verifikasi selanjutnya kelompok tersebut sudah dapat didanai dan bagi kelompok yang akan didanai setiap anggotanya harus menandatangani surat perjanjian dan surat pemberian bantuan. Tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang dijalankan, dikatakan bahwa semua anggota kelompok yang meminjam harus menghadiri verifikasi berkas untuk mengetahui kebenaran dari formulir tersebut tetapi kenyataannya salah satu anggota yang ingin meminjam tidak menghadiri verifikasi tetapi verifikasi tersebut dapat berjalan dan juga dapat didanai.

⁵ UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

⁶ KPMD/K (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan)

⁷ TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)

⁸ SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan)

Penyaluran Dana

Penyaluran dana SPP tersebut ditetapkan oleh TPK, kemudian dilakukan proses penyaluran dana oleh UPK, TPK, Lurah, FK (Fasilitator Kecamatan ekonomi) dan kelompok yang meminjam. Adapun besaran dana yang dapat dipinjam untuk setiap orang dalam tiap kelompok adalah maksimal 5 juta tidak boleh lebih, dengan bunga 1,25% perbulan sesuai dengan perjanjian yang telah desepakati bersama, dan proses pengembaliannya bisa diangsur tiap bulan selama setahun atau sekaligus. Dan apabila dalam suatu kelompok perempuan yang mengajukan usulan ke PNPM Mandiri Perdesaan dan sudah di danai haruslah mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya apabila tidak maka kelompok tersebut tidak dapat diprioritaskan lagi serta tidak dapat diberi pinjaman lagi.

Berikut akan ditampilkan anggaran kelompok SPP kelurahan maridan dan nama-nama kelompok perempuan yang mengajukan pinjaman uang dari Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kelurahan Maridan. Seperti yang terlihat pada tabel 1 dan 2 berikut ini:

Tabel 1. Anggaran Kelompok SPP Kelurahan Maridan Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010 dan 2011

No	Nama Kelompok	Besaran Dana
1.	Anang Gambus Maridan	Rp 30.500.000,00
2.	Harapan Indah Maridan	Rp 24.000.000,00
3.	Tanjung Harapan Tengah	Rp 35.000.000,00
4.	Kelompok Yasinan Al-Falah	Rp 22.000.000,00

Sumber : UPK Kelurahan Maridan

Dari tabel diatas dapat dilihat besaran Anggaran SPP di Kelurahan Maridan setiap tahunnya berbeda-beda yakni Tahun 2008 yaitu sebesar Rp 30.500.000,00 Tahun 2009 sebesar Rp 24.000.000,00 Tahun 2010 sebesar Rp 35.000.000,00 dan Tahun 2011 sebesar Rp 22.000.000,00 di sebabkan karena setiap tahunnya kelompok yang meminjam juga berbeda. Ini menandakan bahwa masyarakat kelurahan maridan sangat aktif dalam peminjaman modal.

Tabel 2. Kelompok yang Meminjam Dana SPP

No	Nama Peminjam	Jumlah Dana yang di Pinjam	Bunga 1.25%	Angsuran PerBulan
1	Ijak	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
2	Suryati	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
3	Muhariyati	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
4	Wahyuti	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
5	Nurul Ismaniyah	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 275.000
6	Mastiah	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 275.000
7	Arbiah	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
8	Suhartatik	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 275.000

9	Minah	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
10	Sulastri	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000
11	Nurjanah	Rp 2.000.000	Rp 25.000	Rp 250.000

Sumber : UPK Kelurahan Maridan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Adapun besaran dana yang harus dibayar perbulan adalah sebesar Rp 250.000 atau Rp 275.000 dan tergantung kesanggupan anggota yang meminjam untuk membayar dan harus melunasi yang telah ditentukan yakni paling lama masa angsurannya selama 12 bulan atau sekaligus. Pengangsuran dilakukan selama 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 1,25%, misalnya saja : Jumlah dana yang di pinjam Rp 5.000.000, Bunga 1, 25% Perbulan maka Rp 5.000.000 x — = Rp 62.500 (bunga yang harus dibayar perbulan) Jadi Rp 5.000.000 : 12 = Rp 416.667. Maka angsuran yang harus dibayar perbulan adalah Rp 416.667 + 62.500 = Rp 479.167.

Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Air Bersih

Sebelum dilaksanakannya pembangunan sarana air bersih warga kelurahan maridan sangat sulit mendapatkan sarana air bersih jika pun ada masyarakat menggunakan sumur bor dan membeli air dan memanfaatkan air hujan untuk mandi sedangkan air yang untuk diminum masyarakat maridan mengambilnya di rumah sakit, karena rumah sakit menyediakan air bersih yang sudah dijernikan, dengan demikian maka TPK mengajukan proposal tentang pembangunan sarana air bersih guna untuk memenuhi kebutuhan yang ada dikelurahan maridan maka dibentuklah program sarana air bersih. adapun yang menjadi alur dalam tahap pembangunan sarana air bersih yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi
2. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi.
3. pelatihan KPMD/K.
4. Penggalian Gagasan
5. Musyawarah Desa (Mudues) Perencanaan
6. Verifikasi usulan
7. MAD Prioritas Usulan
8. MAD Penetapan Usulan
9. Mudex Informasi Hasil MAD Penetapan
10. Mudex Serah Terima
11. Evaluasi

Pelaksanaan program sarana air bersih sudah terlaksana meskipun waktu pengerjaan yang ditentukan dari anggaran 2010 dan batas waktu pengerjaannya adalah 120 hari tetapi terealisasinya tanggal 26 september 2012 karena terkendala pemasangan listrik maka mereka harus menunggu giliran pemasangan, listrik sendiri bertujuan untuk dapat mengalirkan kerumah warga dan memompa air dari sumur ke bak air yang telah dibuat setelah listrik tersebut dipasang maka air tersebut sudah bisa dialirkan ke rumah warga, tetapi air bersih yang dbuat tidak begitu bersih karena airnya masih berwarna (keruh) dan yang ingin memasang air tersebut dikenakan

biaya dengan perhitungan Rp 10.000 Perderum maka dari itu banyak warga yang tidak memasang air tersebut mereka lebih memilih memakai sumur atau membeli air.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih karena air bersih manfaat besar bisa dipakai mandi dan lain sebagainya dan penggunaannya sangat dibutuhkan sehari-hari. Melalui PNPM-MP tersebut diharapkan dapat terjadi suatu proses pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dapat terjun langsung dalam pembangunan yang dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat yang harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasa aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasikun (2000:27) pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigm baru pendekatan pembangunan. Paradigm pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.

Faktor Penghambat

Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis terdiri dari dua factor yakni faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal

Faktor SDM merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan, karena SDM yang ada di kelurahan maridan masih belum optimal dalam menjalankan program kegiatan yang ada dan kurangnya transparansi, keterbukaan serta komunikasi dengan masyarakat dan pelaku PNPM-MP di Kecamatan dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat yang ditandai dengan absennya masyarakat yang ditandai dengan absennya masyarakat dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan melalui PNPM-MP dari data hasil wawancara dan pengamatan penulis ketahui bahwa rendahnya minat masyarakat di kelurahan maridan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan PNPM mandiri perdesaan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP sangat di perlukan karena adanya partisipasi masyarakat tersebut pelaksanaan PNPM-MP dapat berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat adalah sebuah tahapan bentuk partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan sebuah pembangunan, dan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang terwujud tenaga, uang barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan maridan sudah teralisasi secara optimal seperti adanya pembangunan sarana air bersih meskipun waktu pengerjaannya sangat lambat yang mulanya hanya diberi waktu 120 hari dari anggaran tahun 2010 tetapi mundur dalam jangka waktu 2 tahun dan selesai pada tahun 2012 dalam proses pelaksanaan sarana air bersih dan sekarang masyarakat sudah bisa merasakan manfaat pembangunan tersebut meskipun air bersihnya masih sedikit berwarna.

Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sudah terlaksana secara optimal, keaktifan kelompok perempuan dari kelurahan maridan untuk melakukan pinjaman melalui PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 hingga sampai sekarang yakni ditahun 2012, dengan pinjaman modal tersebut masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola dengan baik, seperti untuk modal usaha rumah tangga serta untuk modal koperasi ibu-ibu PKK di kelurahan Maridan. Begitu pula dengan pengembalian pinjaman modal kelompok perempuan dari kelurahan Maridan, telah lunas semua baik untuk anggaran 2008, 2009, 2010, dan 2011.

Beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan terdiri dari faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
Yaitu dari segi SDM (Sumber daya masyarakat), adanya keterbatasan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Maridan yakni TPK dan Monitoring dalam menerapkan hasil pelatihan sehingga kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Faktor Eksternal
Yaitu dari segi partisipasi masyarakat, sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa mandiri dalam hal pencapaian keberhasilan pembangunan karena kurangnya rasa solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat yang disibukkan dengan kepentingan pribadi dari setiap masyarakat dan kurangnya komunikasi dan keterbukaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Kelurahan Maridan sehingga terjadi permasalahan, masalah pembebasan lahan dan tidak sigapnya TPK dari pihak PLN dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas program yang lebih mendekati diri kepada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat merasa yakin untuk dikembangkan dan diberdayakan sehingga dengan sendirinya kemiskinan dapat ditentaskan.
2. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan Maridan TPK dan Monitoring agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan dapat bertanggung jawab serta meningkatkan rasa solidaritas dan kerja sama antar anggota masyarakat dengan cara mengajak dan melibatkan diri dan turut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Daftar Pustaka

- Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Edisi Juli 2007.
- Buku Petunjuk Teknik Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Edisi Juli 2007.
- Buku Pentunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*. Edisi Mei 2010.
- Gunawan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusnadi, 2000, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manurung 2003, *Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi*, Gramedia Pustakaindo, Jakarta.
- Miles, M.B. dan Huberman AM, 1984, *An Xpenden Source book, Qualitative Data Analysis*, Suge Publication, Landon
- Narwoko, 2006, *Pengantar Sosiologi*, Cetak Pertama, Murai Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Rian D. 2004, *Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputerindo, Jakarta.
- H.M. Safi'i, 2009, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Averroes Press, Malang
- Sriwiyanto, 2006, *Implementasi Kebijakan Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Royat, Sujana. 2007. *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Lembaga Kesra-RI, Jakarta.
- Supriyanto, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Muari Kendana, Jakarta.
- Tjandraningsih , 1996, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Makalah Simposium, Bappenas, Jakarta.
- Tjetjep R.R, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wahab, 2000, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Yrama Widia, Bandung.
- Widodo Djoko, 2006, *Kebijakan Pembangunan, Formulasi dan Impementasi*. Bayumedia, Jakarta.
- Wrihatnolo, 2008 *Manajemen Keuangan Untuk Usaha Kecil*, Andi, Yogyakarta

Badan Pusat Statistik, 2005, Kemiskinan
BAPPENAS, 2004, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Laporan Tahunan, Bappenas, Jakarta
<http://www.p2kp.org> (di akses pada tgl 23 may 2012)
erniqomariyah@gmail.com tentang implementasi pnpm (diakses pada tgl 23 may
2012